

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi ini, komunikasi menjadi salah satu aspek paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif tidak hanya berperan dalam hubungan antarpribadi, tetapi juga berfungsi sebagai komponen kunci dalam keberhasilan organisasi dan pemerintahan. Komunikasi juga merupakan suatu proses di mana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, mengubah perilaku, atau menyampaikan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (Effendy, 2009).

Dalam pembangunan yang sangat pesat, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peranan strategis dalam menjamin layanan masyarakat dan mengimplementasikan berbagai program pemerintah. Peran ini diperkuat melalui peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana menegaskan bahwa desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, dan adat istiadat masyarakat desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan tersebut, desa memiliki otonomi untuk merumuskan kebijakan lokal dan menetapkan aturan pelaksanaan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian hak asal usul dan adat istiadat. Sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman, dan damai.

Kepala desa memegang posisi strategis sebagai pemimpin dalam struktur pemerintahan desa. ia tidak hanya bertindak sebagai pengambil kebijakan desa. tetapi juga sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat desa dan pemerintah daerah maupun pusat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa dituntut memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas untuk mendorong kemajuan pembangunan di desanya. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki tanggung jawab utama untuk membimbing, mengarahkan, dan memengaruhi masyarakat dalam setiap proses pemerintahan. Pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel. Dalam konteks ini, keberhasilan atau kegagalan pelayanan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang dijalankan, serta sistem

pemerintahan desa yang efektif dan terorganisasi dengan baik. Komunikasi yang efektif antara kepala desa dan perangkat desa menjadi syarat mutlak agar berbagai informasi terkait pembangunan, layanan administrasi, dan kebijakan desa dapat diterima masyarakat dengan jelas, tepat dan menyeluruh. Namun demikian realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa dapat menjalankan komunikasi secara optimal. Masih banyak desa, terutama di wilayah-wilayah terpencil, yang menghadapi hambatan serius dalam proses komunikasi akibat keterbatasan sarana prasarana, seperti jaringan komunikasi, akses jalan, serta media informasi yang memadai. Situasi ini berdampak langsung pada lambatnya penyampaian informasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan tidak meratanya pelayanan yang diberikan.

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jumlah desa yang sangat besar di seluruh wilayah nusantara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, dari total 84.048 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, masih terdapat ribuan desa yang menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar, termasuk di wilayah provinsi Sumatera Barat. Salah satu wilayah yang mengalami kondisi tersebut secara nyata adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang memiliki karakteristik geografis berupa wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas.

Salah satu desa di wilayah ini adalah Desa Makalo, yang secara administratif berada di Kecamatan Pagai Selatan dan memiliki luas wilayah 115,60 km², dengan enam dusun yang tersebar, yaitu: Tubeket, Makalo, Bere, Parakbatu, Mapoupou, dan Talokpulei. Wilayah ini dikenal dengan kondisi geografisnya yang menantang, terdiri atas daerah pesisir dan perbukitan, yang mempersulit akses antarwilayah, terutama saat kondisi cuaca ekstrem atau saat transportasi laut tidak memungkinkan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pembangunan sarana prasarana dasar, termasuk jalan, jembatan, jaringan komunikasi, dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Hal ini dapat memengaruhi efektifitas pelayanan masyarakat dan penyampaian informasi oleh perangkat desa.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 yang di rilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Desa Makalo dikategorikan sebagai desa berkembang dengan skor indeks sebesar 0.6791. Kategori ini menunjukkan bahwa meskipun desa tersebut telah mengalami peningkatan dalam beberapa aspek pembangunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi, terutama dalam aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur, termasuk rendahnya kapasitas sarana prasarana yang mendukung pelayanan masyarakat.

Keterbatasan infratraktur di Desa Makalo tidak hanya berdampak pada mobilitas fisik tetapi juga mempengaruhi efektivitas komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. komunikasi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat menghadapi tantangan serius ketika informasi tidak disampaikan secara cepat, merata, dan tepat sasaran. Beberapa dusun yang hanya dapat diakses melalui jalur laut atau jalan yang rusak, jembatan yang tidak berfungsi, dan cuaca ekstrem memperparah kondisi tersebut, apalagi saat musim hujan, dan juga tidak tersedianya jaringan komunikasi digital yang stabil di seluruh wilayah desa. hanya dua dari enam dusun yang dapat mengakses jaringan komunikasi secara stabil, selebihnya ada yang menggunakan Starlink, dan bahkan tidak ada jaringan sama sekali di wilayahnya. Selain itu juga, masyarakat yang tinggal di dusun-dusun terjauh mengalami kesulitan mengakses kantor desa untuk kepentingan administrasi, baik karena keterbatasan sarana transportasi, biaya, maupun waktu. Minimnya infrastruktur komunikasi, pembangunan dan sarana prasarana tersebut menyebabkan informasi penting, seperti bantuan sosial, jadwal musyawarah, dan perubahan kebijakan, tidak tersebar secara merata dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintahan desa dan masyarakat.

Kepala Desa Makalo, sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat lokal, menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerima informasi dengan baik dan dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. dalam situasi ini, keefektifan pola komunikasi yang diterapkan oleh kepala desa menjadi kunci penting dalam mengatasi hambatan komunikasi tersebut. tidak cukup hanya mengandalkan saluran formal atau teknologi, kepala desa perlu menyesuaikan pendekatan komunikasinya dengan kondisi geografis, budaya lokal, serta tingkat literasi masyarakat. dengan begitu tujuan dan cita-cita dari suatu organisasi bisa terwujud. Dalam tinjauan teoritis, pola komunikasi memiliki makna sebagai sistem atau struktur penyampaian pesan yang berlangsung melalui saluran tertentu, baik formal maupun informal, interpersonal maupun kelompok (Khasanah, 2023). Devito (dalam kurniawan at al.,2023) menjelaskan bahwa pola komunikasi dapat berbentuk linear, sirkuler, atau jaringan, tergantung pada struktur organisasi dan konteks komunikasinya. Sementara itu, dalam konsep kepemimpinan, pendekatan situasional menuntut pemimpin untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan kondisi pengikut dan lingkungan (Hersey dan Blanchard, 2021).

Dalam konteks Desa Makalo perangkat desa dituntut untuk menerapkan pola komunikasi yang responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap hambatan sarana prasarana tantangan kondisi geografis dan sosial masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas peran komunikasi dalam pembangunan desa seperti oleh Wahyuvi dan Krisyantono (2020) yang menekankan pentingnya pola komunikasi pembangunan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, serta Maspuroh et al, (2023) yang meneliti peran pelatihan komunikasi perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan. Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana pola komunikasi diterapkan oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai respons langsung terhadap hambatan sarana prasarana yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi dan nilai kebaruan karena berupaya menggali secara mendalam bagaimana perangkat Desa Makalo menerapkan pola komunikasi untuk mengatasi hambatan sarana prasarana demi mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif dan inklusif. Desa Makalo dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena mewakili karakteristik desa tertinggal dengan kondisi jarak jauh dan infrastruktur yang tidak memadai dan menjadi studi kasus yang relevan untuk mengembangkan model komunikasi pelayanan berdasarkan latar belakang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengetahui Penerapan Pola Komunikasi Perangkat Desa Makalo dalam Mengatasi Hambatan sarana Prasarana Dengan Pelayanan Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu bagaimana Penerapan Pola Komunikasi Perangkat Desa Makalo dalam Mengatasi Hambatan sarana Prasarana Dengan Pelayanan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pola Komunikasi Perangkat Desa Makalo dalam Mengatasi Hambatan sarana Prasarana Dengan Pelayanan Masyarakat?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan manfaat teoritis, manfaat akademik, dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks organisasi publik di tingkat desa. penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan pola komunikasi di wilayah yang mengalami tantangan geografis dan keterbatasan sarana prasarana, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan model komunikasi berbasis konteks lokal.

b. Manfaat Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik mendalami isu komunikasi publik, komunikasi pembangunan, dan kepemimpinan desa. penelitian ini juga menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan pendekatan atau lokasi yang berbeda.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran tentang pola komunikasi yang diterapkan oleh perangkat Desa Makalo dalam mengatasi hambatan sarana prasarana. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam merancang pendekatan komunikasi yang lebih efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa dengan kondisi geografis yang menantang.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dilakukan pembatasan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada penerapan pola komunikasi yang dilakukan oleh perangkat desa makalo pada masyarakat desa tersebut dalam hal pelayanan masyarakat desa periode 2022-2025
2. Pelayanan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pelayanan administrasi, penyampaian informasi, dan implementasi program pembangunan desa.